

## ABSTRAK

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa atau *in absentia* dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Proses pemeriksaan *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi dan Upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus secara *in absentia*.

Peradilan *in absentia* dalam UU tipikor diatur dalam Pasal 38 ayat (1), tujuannya untuk mengembalikan kerugian. Dalam UU PP TPPU, diatur dalam Pasal 79 yang bertujuan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana yang diputus secara *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yaitu upaya hukum banding. Perbedaannya adalah jika dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berhak mengajukan upaya hukum banding adalah terpidana yang bersangkutan dan dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah diputuskan, sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dapat mengajukan upaya hukum banding adalah terpidana dan kuasanya, serta dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak disebutkan batas waktu pengajuannya.

***Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi***

**ABSTRACT**

*Examination without the presence of a defendant or in absentia is known in criminal acts of corruption and money laundering. The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a problem approach, statute approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The problems in this thesis are: The process of examining in absentia on money laundering crimes whose crimes comes from corruption and legal efforts that can be carried out by money laundering offenders who are terminated in absentia.*

*Justice in absentia in tipikor's law is regulated in Article 38 paragraph (1), the purpose of which is to recover losses. In law of PP TPPU, it is regulated in Article 79 which aims to prevent and eradicate the crime of money laundering in implementation of the judiciary to run smoothly. Legal effort that can be taken by convicts are decided in absentia in corruption and money laundering crimes, namely appeal law. The difference is if in the criminal act on money laundering that has entitled to submit an appeal is convict in concerned and within no more than seven days after it has been decided, whereas in the law of corruption that can submit an appeal is an convict and his attorney and in the law of corruption is not stated in the deadline for submission.*

**Keywords: Judicial In Absentia, Money Laundering Crime, Actions Corruption Crime**